



PEMERINTAH
KABUPATEN KARANGANYAR

2024



LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

**DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN KARANGANYAR**



disdagperinaker@karanganyarkab.go.id



www.disdagperinaker.karanganyarkab.go.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI..... i

DAFTAR TABEL ii

DAFTAR GAMBAR..... iii

KATA PENGANTAR..... iv

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang..... 1

 1.2 Gambaran Umum 1

 1.3 Isu Strategis Organisasi 3

 1.4 Landasan Hukum 4

 1.5 Sistematika Penulisan..... 5

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS 6

 2.1. Rencana Strategis 6

 2.2 Rencana Kinerja Tahunan 10

 2.3 Perjanjian Kinerja 20

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 30

 3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 30

 3.1.1 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 30

 3.1.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 - 2024 34

 3.1.3 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan
 Tahun Akhir RPJMD 35

 3.1.4 Perbandingan Capaian Kinerja Utama Kabupaten
 dengan Provinsi dan Nasional 36

 3.1.5 Analisis Keberhasilan Kegagalan dan Solusi 2024..... 36

 3.1.6 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan
 Sasaran Tahun 2024 39

 3.1.7 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan
 Kegiatan 2024 41

 3.2 Realisasi Anggaran 47

BAB IV PENUTUP 51

 4.1 Kesimpulan 51

 4.2 Saran 51

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan	7
Tabel 2.2	Tujuan Sasaran Indikator dan Target Tahun 2020-2024.....	9
Tabel 2.3	Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar Tahun 2024.....	11
Tabel 2.4	Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2024.....	11
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar Tahun 2024	21
Tabel 2.6	PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KARANGANYAR	22
Tabel 2.7	Rencana Kerja Anggaran pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2024	22
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	30
Tabel 3.2	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab Karanganyar Tahun 2024	30
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Kinerja Utama Tahun 2022-2024.....	34
Tabel 3.4	Kemajuan Realisasi Sasaran Strategis	35
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian dengan Standar Provinsi	36
Tabel 3.6	Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional	36
Tabel 3.7	Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi Tahun 2024	37
Tabel 3.8	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran.....	39
Tabel 3.9	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan Tahun 2024.....	42
Tabel 3.10	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2024	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar3

Gambar 3.1 Realisasi Kinerja Utama Tahun 202434

Gambar 3.2 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2022-202435

Gambar 3.3 Grafik Alokasi Anggaran Disdagperinaker 202440

Gambar 3.4 Grafik Realisasi dan Efisiensi Anggaran 202441

Gambar 3.5 Pelatihan Berbasis Kompetensi Pembuatan Roti dan Kue45

Gambar 3.6 Pelatihan Berbasis Kompetensi Tata Kecantikan Rambut.....45

Gambar 3.7 Tera/Tera ulang UTTP Ukur Takar Timbang dan Peralatannya di SPBU46

Gambar 3.8 Pelatihan Peningkatan Produktivitas Pelintingan dan Blending Sigaret Kretek Tangan46

Gambar 3.9 Kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota.....47

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami sampaikan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar sesuai dengan kebijakan dan program yang dijabarkan melalui kegiatan, sekaligus merupakan wujud tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan. Laporan ini juga mencakup evaluasi yang dapat dijadikan sebagai umpan balik bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak.

Karanganyar, 3 Februari 2025
KEPALA DINAS PERDAGANGAN,
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KARANGANYAR



MARTADI, S.Sos., M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19650323 198908 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud pertanggungjawaban, akuntabilitas, dan transparansi terhadap pencapaian sasaran Perangkat Daerah yang telah ditargetkan. Pelaporan ini sesuai dengan amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja, maka peran Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab Karanganyar adalah pada urusan perdagangan, perindustrian, tenaga kerja dan urusan penunjang pemerintah daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan akuntabilitas, transparansi, dan pertanggungjawaban pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar tahun 2024 yang menggambarkan pencapaian tujuan sasaran strategis selama tahun 2024 sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan

1.2 Gambaran Umum

Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar. Struktur organisasi mengalami perubahan dengan adanya Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja.

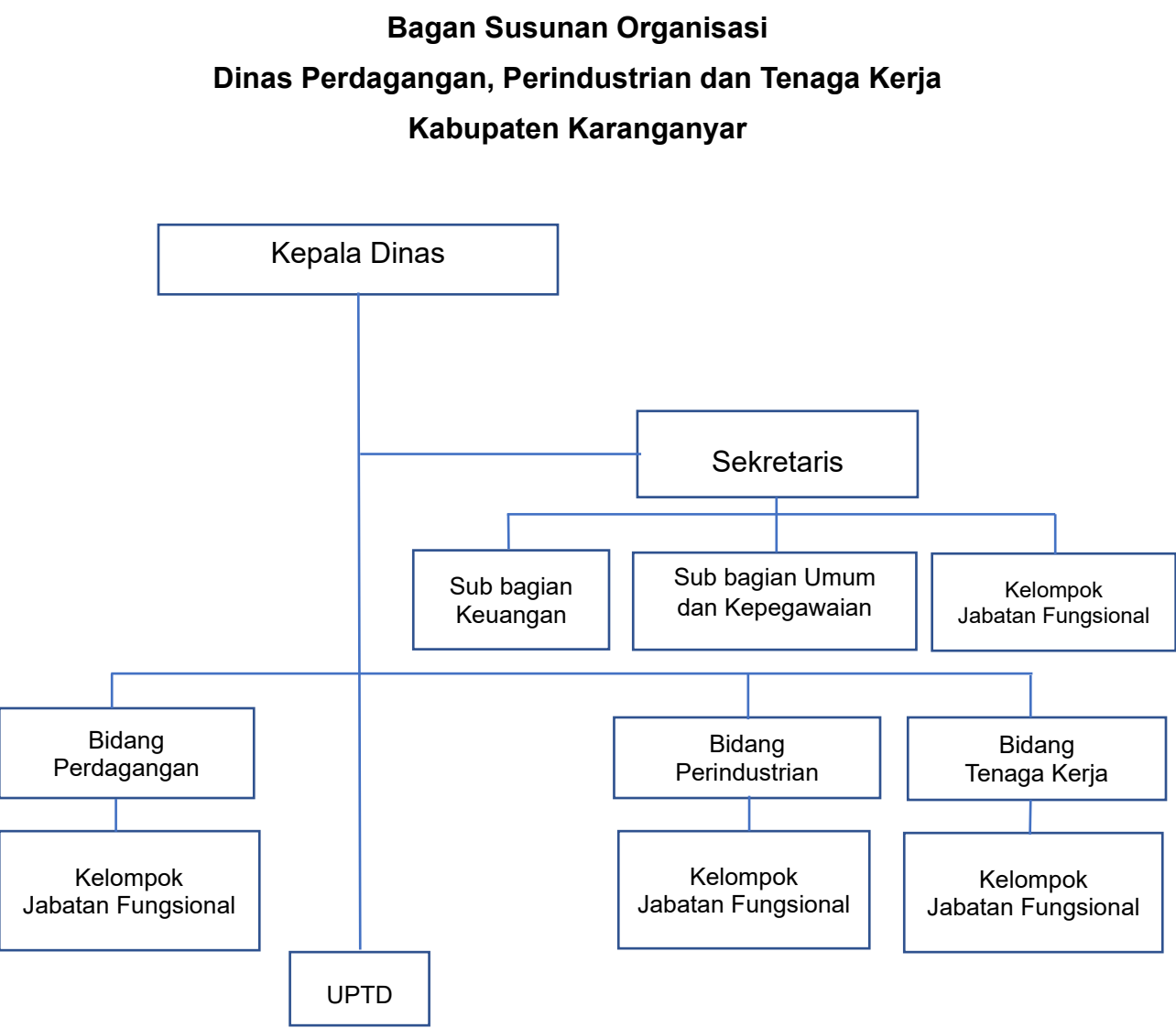
Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Disdagperinaker adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan

bidang perdagangan, perindustrian, dan tenaga kerja. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Uraian tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah sebagai berikut

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang perdagangan, bidang perindustrian dan bidang tenaga Kerja,
- b. Perumusan perencanaan bidang perdagangan, bidang Perindustrian dan bidang tenaga kerja,
- c. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi pengendalian fasilitasi bidang perdagangan, bidang perindustrian dan bidang tenaga kerja,
- d. Pelaksanaan kebijakan bidang perdagangan, bidang perindustrian dan bidang tenaga kerja,
- e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas,
- f. Pengendalian penyelenggaraan tugas unit pelaksana teknis dinas,
- g. Pelaksana tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :



Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar

1.3 Isu Strategis Organisasi

Sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja mempunyai aspek strategis sebagai berikut :

- a. Sebagai perangkat daerah yang dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah pusat dan lembaga-lembaga keterampilan dalam penyediaan akses dan mutu pelatihan vokasi untuk menciptakan tenaga kerja yang memiliki kompetensi,
- b. Menciptakan daya saing tenaga kerja Indonesia di pasar kerja
- c. Peningkatan jaringan teknologi informasi dalam mendukung perkembangan produk dan informasi pemasaran secara digital,
- d. Sebagai perangkat deraah yang membina industri kecil dan menengah.

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya ketersediaan lapangan pekerjaan, penyediaan tenaga kerja terampil, sarana dan prasarana peningkatan kapasitas tenaga kerja dan lembaga pelatihan kerja yang berkualitas.
- b. Belum optimalnya kepatuhan pengusaha dan pekerja terhadap peraturan perundang-undangan.
- c. Belum optimalnya sarana dan prasarana perdagangan.
- d. Belum optimalnya pengembangan sentra industri.

1.4 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut.

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
- c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

1.5 Sistematika Penulisan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja ini tahun 2024 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan

BAB II Perencanaan Kinerja

BAB III Akuntabilitas Kinerja

BAB IV Penutup

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) sangat diperlukan oleh masing-masing Perangkat Daerah. Rencana Strategis akan membantu para Kepala Perangkat Daerah dan seluruh jajarannya dalam menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai, sehingga Perangkat Daerah dapat lebih berperan dalam memberikan respon terhadap berbagai perubahan dan tuntutan lingkungan. Disamping itu rencana strategis akan memperjelas konsep organisasi Pemerintah Daerah dalam melakukan aktivitas agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan seluruh potensi dan kemampuan yang ada secara integral komprehensif.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, revaluasi dan evaluasi kinerja. Rencana strategis menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP. Perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan seluruh aspek baik yang menyangkut potensi, peluang dan kendala yang ada.

Perencanaan strategis harus disusun secara integral komprehensif dan implementatif sehingga dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien serta dapat mencapai hasil yang optimal. Rencana strategis Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar diwujudkan dalam dokumen Rencana Strategis 2024-2026. Di dalamnya mencakup Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Strategi, Arah Kebijakan dan Program.

Tabel 2.1
Tujuan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Indikator	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dengan semangat kegotong royongan		Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatkan kualitas lembaga pelatihan kerja	Meningkatkan kompetensi dan kualitas produktivitas tenaga kerja yang sesuai pasar kerja
	Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang produktif dan kompetitif	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Meningkatkan pelayanan antar kerja Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	Meningkatkan Perluasan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja
		Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatkan pemahaman peraturan ketenagakerjaan bagi pekerja dan pengusaha	Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis di perusahaan.
Meningkatkan perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal		Pertumbuhan ekonomi	Meningkatkan pengembangan sektor perdagangan	Pemantapan kelembagaan dan sarana prasarana pendukung sektor perdagangan
	Meningkatkan produktivitas sektor	Jumlah produk lokal yang berpotensi unggulan	Mengoptimalkan ketersediaan SDM dan	

Tujuan	Sasaran	Indikator	Strategi	Kebijakan
	perdagangan yang berdaya saing		peralatan standart kemetrollogian	
	Meningkatkan kuantitas sentra industri kecil dalam pengembangan produk IKM	Jumlah sentra industry yang dibentuk	Menciptakan sentra industri mikro	Pengembangan sektor industri mikro untuk memperkuat basis industri yang tangguh
Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat reformasi birokrasi		Indeks Reformasi Birokrasi	Mengoptimalkan sumber daya kelembagaan untuk menunjang kinerja perangkat daerah	Mengoptimalkan kinerja sumber daya kelembagaan yang berorientasi pelayanan yang Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaborasi
	Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD		

Sumber : Rencana Strategis Disdagperinaker 2024-2026

Tabel 2.2

Tujuan Sasaran Indikator dan Target Tahun 2020-2024

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Target Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Tujuan Meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Na	74.03	74.51	74,51	
Tujuan Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dengan semangat kegotongroyongan	Indeks Reformasi Birokrasi					77.20
Sasaran Meningkatkan pelayanan calon tenaga kerja	Rasio Angkatan Kerja yang bekerja	68.96	69.2	69.4	69,4	-
Sasaran Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang produktif dan kompetitif	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)					71.1
Tujuan Meningkatkan produktivitas sektor perdagangan	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	Na	1.65	1.67	4,66	-
Tujuan Meningkatkan daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal	Pertumbuhan ekonomi					4.7
Sasaran Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perdagangan	Persentase pasar dalam kondisi baik	Na	44.4	50	50	-
	Persentase retribusi dalam PAD	1.4	0.93	0.96	0,74	-
Sasaran Meningkatkan produktivitas perdagangan yang berdaya saing	Jumlah produk lokal yang berpotensi unggulan					5
Tujuan Meningkatkan produktivitas Sektor Perindustrian	Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian	Na	2.6	3.0	4.11	-
Tujuan Meningkatkan daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal	Pertumbuhan ekonomi					4.7

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Target Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Sasaran Meningkatkan industri kecil dan menengah	Pertumbuhan industri kecil dan menengah	Na	29	30	32	-
Sasaran Meningkatkan kuantitas sentra industri kecil dalam	Jumlah sentra industri kecil yang dibentuk					3
Tujuan Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang perdagangan,.96 perindustrian dan tenaga kerja.	Nilai SAKIP	62	70	70.5	71.26	
Tujuan Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokasi					65
Sasaran Meningkatnya kinerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang perdagangan, perindustrian dan tenaga kerja.	Nilai IKM	82	87	88	82	
Sasaran Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah	Nilai Sakip OPD					71.5

2.2 Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan salah satu instrumen SAKIP. RKT diperlukan agar dalam penyusunan Rencana Kerja fokus dan diarahkan pada rencana kinerja yang telah direncanakan pada Rencana Strategis sesuai dengan tahun berkenaan. Sehingga dengan demikian diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan tidak hanya diorientasikan pada terlaksananya kegiatan (output), akan tetapi perencanaan program dan kegiatan harus direncanakan untuk menghasilkan manfaat (outcome) yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Rencana Kinerja Tahunan diturunkan dari Tujuan dan Sasaran Strategis Pembangunan yang disertai dengan Indikator Kinerja Utama dan target kinerja yang ada pada Rencana Strategis Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 – 2026. Rencana Kinerja Tahunan, perlu dilakukan

oleh instansi pemerintah agar dapat menyusun prioritas program dan kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan semua kegiatan perangkat daerah menjadi lebih terarah.

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja pada tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator	Formulasi	Satuan	Target kinerja
Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang produktif dan kompetitif	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Jumlah orang yang berkerja dibagi jumlah angkatan kerja dan bukan angkatan kerja kali100 persen	%	71.10
Meningkatkan produktivitas perdagangan yang yang berdaya saing	Jumlah produk lokal yang berpotensi unggulan	Jumlah produk lokal yang memiliki keunggulan	unit	5
Meningkatkan kuantitas sentra industri kecil dalam pengembangan produk IKM	Jumlah sentra industri kecil yang dibentuk	Jumlah sekelompok Industri Kecil dalam satu lokasi/tempat yang terdiri dari paling sedikit 5 (lima) unit usaha yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis, dan/atau melakukan proses produksi yang sama	sentra	3
Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah	Nilai Sakip	Hasil Penilaian Inspektorat /APIP	Skor	71.55

Tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja akan diwujudkan dalam program dan kegiatan di tahun 2024 sebagaimana berikut:

Tabel 2.4
Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target
Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja bidang	Meningkatnya kinerja perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja bidang		

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target
perdagangan, tenaga kerja, koperasi usaha kecil dan menengah.	perdagangan, tenaga kerja,koperasi usaha kecil dan menengah.		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70
		Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dokumen
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
		Penyediaan Gaji dan tunjangan	107 orang
		Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/ Semesteran SKPD	12 laporan
		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 dokumen
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 dokumen
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 laporan
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	1 dokumen
		Pengolahan Data Retribusi Daerah	12 laporan
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen
		Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	1 dokumen
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 paket
		Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	1 paket
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan
		Penata usahaan arsip dinamis pada SKPD	1 dokumen
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
		Pengadaan Mebel	20 unit
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 unit
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 laporan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 laporan
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 paket
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 paket
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit
Meningkatkan perluasan penempatan tenaga kerja	Meningkatnya pelayanan tenaga kerja, calon tenaga kerja	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	70%
		Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja	
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja makro	1 dokumen
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	30%
		Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	170 orang
		Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	50 lembaga
		Kegiatan Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	
		Penyediaan Sumber Daya Perijinan Lembaga	4 perijinan

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target
		Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	
		Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaa Kecil	
		Pelaksanaan Konsultasi produktivitas pada Perusahaan kecil	2 dokumen
		Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tingkat daerah kabupaten /kota	
		Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	2 perusahaan
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	57%
		Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	
		Penyediaan Sumber daya Pelayanan antar Kerja	1500 orang
		Pelayanan Antar Kerjja	50 orang
		Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	100 orang
		Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan.	20 orang
		Perluasan Kesempatan Kerja.	25 orang
		Kegatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	
		Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	4500 orang
		Kegiatan Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	
		Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI)	40 orang
		Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	15 orang
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	100%
		Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target
		untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	20 perusahaan
		Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	20 perusahaan
		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan.	1 laporan
		Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	
		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	15 orang
		Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	30 perusahaan
		Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja /Serikat Buruh serta Non Afiliasi	1 laporan
		Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	1 lembaga
		Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan	10 perusahaan

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target
		Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	
		PROGRAM PELAYANAN PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	30%
		Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	15 dokumen
		PENERBITAN TANDA DAFTAR GUDANG	
		Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	15 dokumen
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	55.55%
		Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	
		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	17 unit
		Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	17 unit
		Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	
		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	17 dokumen
		PROGRAM PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	27.78%
		Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di	

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target
		Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	
		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	17 laporan
		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	17 laporan
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	50 produk
		Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
		Pameran dagang lokal	40 pelaku usaha
		Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	17 pelaku usaha
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	27%
		Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	2000 unit
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	15 produk
		Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	
		Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan	30 umkm

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target
		Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	33%
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 dokumen
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran, dan Perwilayahan Industri	1 dokumen
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industr	2 dokumen
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 dokumen
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat.	3 dokumen
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	
		Penerbitan Izin Usaha (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor Perindustrian yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target
		Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission	1 dokumen
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	20%
		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	
		Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). (SIINas).	1 dokumen
		Diserminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/kota melalui SIINas	1 dokumen
		Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 dokumen

Sumber: DPA Disdagperinaker 2024

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan tekad atau janji Pejabat Publik, untuk mencapai kinerja yang telah diperjanjikan sebagai konsekuensi atas penggunaan sumber daya yang tersedia. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu

berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja 2024 disusun mengacu pada dokumen Rencana Strategis 2024-2026. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar pada menyusun perjanjian kinerja pada tahun 2024.

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Menurut Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Instansi Pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan OPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian.

Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran Srtegis	Indikator Kerja	Tahun 2024
			Target
1	2	3	4
1	Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dengan semangat kegotongroyongan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	77.20
2	Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang produktif dan kompetitif	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja Daerah	71.10
3	Tujuan 2 : Meningkatkan daya saing perekonomian dengan bersumber potensi ekonomi lokal	Pertumbuhan Ekonomi	6
4	Sasaran 2 : Meningkatkan produktivitas perdagangan	Jumlah produk lokal yang berpotensi unggulan	5 unit
	Sasaran 3 : Meningkatkan produktivitas sektor industri pengolahan	Jumlah sentra industri kecil yang dibentuk	3 sentra
5	Tujuan 3 : Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	72
6	Sasaran 4 : Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah	Nilai Sakip OPD	71.25

Sumber : Rencana Strategis Disdagperinaker 2024-2026

Tenggat waktu antara proses perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran cukup lama yaitu sekitar 1 (satu) tahun sehingga sangat dimungkinkan perencanaan yang disusun belum mencakup seluruh kebutuhan untuk tahun yang direncanakan. Selain itu dalam periode pelaksanaan anggaran sangat dimungkinkan terjadi perubahan keadaan atau perubahan prioritas yang tidak diantisipasi pada saat proses perencanaan.

Demikian juga pada Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar. Pada Tahun anggaran 2024 juga terdapat perubahan anggaran sehingga memerlukan adanya Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024.

Tabel 2.6

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024 DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KARANGANYAR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
	Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang produktif dan kompetitif	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	71.1%
	Sasaran 2 : Meningkatkan produktivitas perdagangan yang yang berdaya saing	Jumlah produk lokal yang berpotensi unggulan	5 unit
	Sasaran 3 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sentra industri kecil dalam pengembangan produk IKM	Jumlah sentra industri kecil yang dibentuk	3 sentra
	Sasaran 4 : Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	71.55

Pencapaian kinerja kegiatan harus didukung dengan anggaran yang mencukupi. Anggaran belanja Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja pada setiap program adalah sebagai berikut

Tabel 2.7

Rencana Kerja Anggaran pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2024

Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Targe t	Anggaran
PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		21.420.000

Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Targe t	Anggaran
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		3.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		3.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD		5.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		3.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		43.000.000
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
	Penyediaan Gaji dan tunjangan		10.679.907.768
	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/ Semesteran SKPD		16.000.000
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		10.000.000
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		15.000.000
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah		16.700.000
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah		8.049.700
	Pengolahan Data Retribusi Daerah		11.950.000
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		615.000.000
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		409.420.000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		14.288.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		27.400.000
	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan		351.800.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		174.000.000

Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Targe t	Anggaran
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		231.675.900
	Penata usahaan arsip dinamis pada SKPD		4.665.000
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		5.000.000
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	Pengadaan Mebel		103.300.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		151.500.000
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		537.257.400
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		76.500.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		3.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		288.770.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		3.733.937.000
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		200.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		65.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		282.854.000
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		
	Penyusunan Tenaga Kerja makro		8.927.250
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		
	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi		1.725.523.000

Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Targe t	Anggaran
	Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		
	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kab/Kota		44.096.750
	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		30.000.000
	Kegiatan Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja		
	Penyediaan Sumber Daya Perijinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi		3.000.000
	Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaa Kecil		
	Pelaksanaan Konsultasi produktivitas pada Perusahaan kecil		2.000.000
	Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tingkat daerah kabupaten /kota		
	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja		2.000.000
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			
	Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota		
	Penyediaan Sumber daya Pelayanan antar Kerja		25.000.000
	Pelayanan Antar Kerja		6.000.000
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja		15.000.000
	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan.		15.000.000
	Perluasan Kesempatan Kerja.		20.000.000
	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online		27.200.000
	Job Fair/Bursa Kerja		25.000.000
	Kegiatan Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		
	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI)		8.000.000
	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan		2.000.000

Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Targe t	Anggaran
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan		15.000.000
	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan		15.000.000
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan.		10.000.000
	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		10.000.000
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		10.000.000
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja /Serikat Buruh serta Non Afiliasi		5.000.000
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota		175.000.000
	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		5.000.000
PROGRAM PELAYANAN PERIZINAN dan PENDAFTARAN PERUSAHAAN			
	Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat,		

Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Targe t	Anggaran
	Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		6.249.500
	PENERBITAN TANDA DAFTAR GUDANG		
	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang		4.510.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			
	Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan		
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan		477.900.000
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		573.500.000
	Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		20.000.000
PROGRAM PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			
	Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		12.232.600
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi		15.000.000

Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Targe t	Anggaran
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			
	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
	Pameran dagang Lokal		38.502.000
	Misi dagang bagi Produk Ekspor Unggulan		6.615.900
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		45.000.000
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		
	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		200.000.000
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		
	PenyusunN Rencana Pembangunan Industri kabupaten		5.000.000
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran, dan Perwilayahan Industri		47.900.000
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		15.000.000
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		20.000.000

Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Targe t	Anggaran
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat.		1.465.965.000
PROGRAM PENGENDALIAN IJIN USAHA INDUSTRI	Penerbitan Izin Usaha (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor Perindustrian yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota		6.800.000
	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission		8.200.000
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). (SIINas).		45.000.000
	Diserminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/kota melalui SIINas		2.200.000
	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas		2.100.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan capaian kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut.

Tabel 3.1

Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Di atas 100%	Melebihi target
2	Tepat 100%	Sesuai Target
3	Di bawah 100%	Di Bawah target

3.1.1

Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalama mencapai tujuan dan sasaran tertentu.

Pengukuran capaian Indikator Kinerja Tahun 2024 tercantum pada tabel berikut :

Tabel 3.2

Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab Karanganyar Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatnya kualitas tenaga kerja yang produktif dan kompetitif	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	71.1%	74.57	104.88 %	Melebihi target	BPS
2	Meningkatkan produktivitas perdagangan	Jumlah produk lokal yang	5 unit	5 unit	100 %	Sesuai target	

	yang yang berdaya saing	berpotensi unggulan					
3	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sentra industri kecil dalam pengembangan produk IKM	Jumlah sentra industri kecil yang dibentuk	3 sentra	3 sentra	100 %	Sesuai target	
4	Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	71.55	71.55	100 %	Sesuai target	

Tenaga kerja yang produktif dan kompetitif merupakan hal penting dalam pembangunan suatu daerah, karena tenaga kerja adalah sumber daya manusia yang menggerakkan perekonomian. Tenaga kerja yang kompeten akan mampu bekerja dengan baik dan mempunyai produktivitas kerja yang baik. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar 2023 terdapat Pengangguran Terbuka sejumlah 19.620 orang, Angkatan kerja sejumlah 566.080 orang dan bukan Angkatan kerja 193.030 orang. Angkatan kerja yang bekerja sejumlah 546.460 orang. Total Angkatan kerja dan bukan Angkatan kerja adalah 759.110 orang.

Capaian Kinerja indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada tahun 2024 termasuk dalam kategori **di atas 100%** atau **melebihi target** yaitu 104.88 %. Tingkat partisipasi Angkatan kerja merupakan perbandingan antara jumlah Angkatan kerja dengan jumlah total Angkatan kerja dan bukan Angkatan kerja sehingga diperoleh nilai TPAK sebesar 74.57 %.

Angka tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) merupakan persentase banyaknya angkatan kerja terhadap Penduduk Usia Kerja (PUK). TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Jadi makin tinggi nilai Angkatan kerja makin banyak pula penduduk yang produktif bekerja menghasilkan barang dan jasa.

Sektor perdagangan juga merupakan penopang perekonomian di Kabupaten Karanganyar. Perdagangan di Kabupaten Karanganyar didukung sarana prasarana perdagangan berupa pasar rakyat dan toko modern. Terdapat (17) tujuh belas pasar rakyat dan 88 (delapan puluh delapan) toko modern. Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karangnyar berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas sektor perdagangan yang berdaya saing melalui peningkatan jumlah produk lokal yang berpotensi unggulan.

Pada tahun 2024 Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar mempunyai target 5 unit produk lokal yang berpotensi unggulan. Realisasi sejumlah 5 unit, sehingga capaian kinerja adalah tepat 100% atau sesuai target.

Produk lokal yang berpotensi unggul merupakan produk rintisan untuk menuju Produk Unggulan Daerah sesuai dengan makna Produk Unggulan Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014. Produk Unggulan merupakan produk, baik berupa barang maupun jasa, yang dihasilkan oleh koperasi, usaha skala kecil dan menengah yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing, daya jual, dan daya dorong menuju dan mampu memasuki pasar global.

Di Kabupaten Karanganyar banyak terdapat produk lokal yang mulai dikembangkan, dari produk kuliner hingga kerajinan. Produk kuliner pun berbahan baku lokal yaitu singkong maupun ubi. Produk lokal yang berpotensi unggul di kabupaten Karanganyar adalah :

- a. Keripik Ubi
- b. Roti Singkong
- c. Gethuk
- d. Kerajinan Bambu
- e. Batik Girilayu

Produk lokal ini yang menjadi perhatian Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar untuk terus dikembangkan dan menjadi produk ikonik Kabupaten.

Pengembangan produk lokal merupakan produk Industri Kecil Menengah Kabupaten Karanganyar. Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar berkomitmen memfasilitasi pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat dalam pembangunan industri serta memberdayakan budaya industri dan/atau kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat melalui pengembangan industri kecil di sentra IKM.

Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar, menetapkan target pembentukan sentra IKM sebanyak 3 (tiga) sentra. Pada tahun 2024 ini **realisasi tepat 100 % atau sesuai target** yaitu sejumlah 3 (tiga) sentra. Sentra Industri Kecil yang ada di Kabupaten Karanganyar adalah Sentra Keripik Ubi, Sentra Batik Girilayu dan Sentra Mebel Gondangrejo.

Upaya pengembangan Sentra Industri Kecil akan terus dikembangkan dengan cara :

- a. Membangun kesadaran masyarakat mengenai potensi ekonomi dari kekayaan daerah yang dimiliki;

- b. Mengembangkan motivasi, kreativitas dan inovasi masyarakat lokal untuk menghasilkan produk bernilai ekonomi tinggi yang bercirikan kearifan lokal; dan
- c. Meningkatkan kemandirian masyarakat lokal dalam membangun ekonomi daerah sehingga mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan kesejahteraan Masyarakat.

Akuntabilitas merupakan salah satu karakteristik good governance dan asas umum dalam penyelenggaraan negara. Penetapan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mendorong Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mengimplementasikan sistem akuntabilitas yang terintegrasi dalam setiap program/kegiatan, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi kinerja. SAKIP merupakan sistem manajemen pemerintah yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Implementasi SAKIP merupakan upaya perbaikan yang dilakukan pemerintah untuk menciptakan good governance dan sistem manajemen pemerintah yang baik.

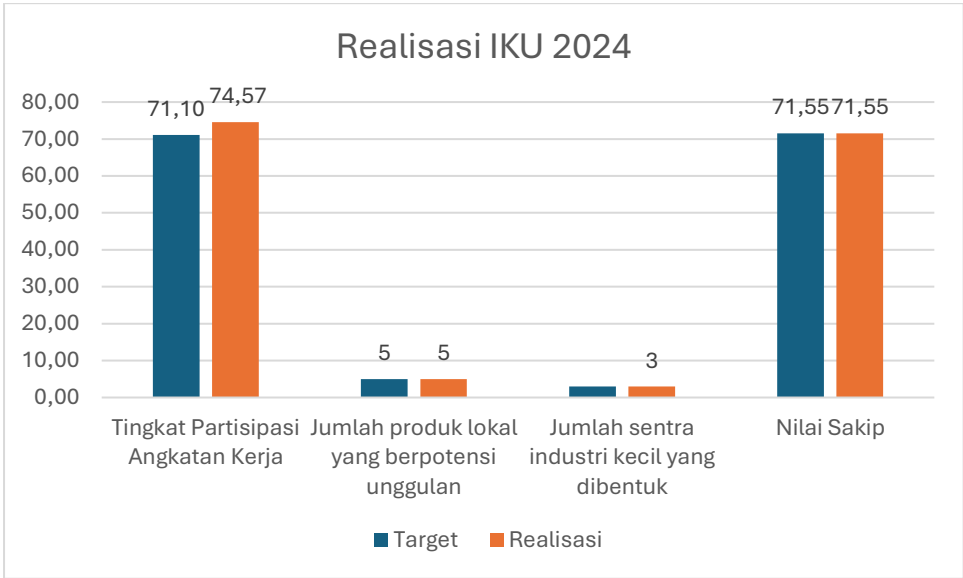
Akuntabilitas dalam lingkungan birokrasi pemerintah merupakan implementasi atas kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi. Instrumen akuntabilitas terdiri dari instrumen dasar dan instrumen pendukung. Instrumen dasar berupa peraturan perundang-undangan, yang disertai dengan komitmen politik dan mekanisme pertanggungjawaban. Sedangkan instrumen pendukung terdiri dari pedoman tingkah laku, sistem monitoring kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan sistem pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas. Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar berupaya untuk meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah. Indikator Akuntabilitas pemerintahan dapat diukur melalui Nilai Sakip Perangkat daerah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan integrasi dari system perencanaan, sistem penganggaran dan system pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Implementasi Sakip di perangkat daerah dievaluasi terkait perencanaan kinerja, pengukuran kinerja serta pelaporan. Pelaksanaan kinerja diawali dari penerapan pohon kinerja dan cascading. Penerapan cascading memungkinkan pencapaian output dan outcome dapat tercapai. Pada tahun 2024, Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar menetapkan target Nilai Sakip sebesar 71.55. Realisasi nilai Sakip sebesar 71.55, sehingga capaian kinerja sebesar **tepat 100%** atau **sesuai target**.

Berdasarkan penilaian Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah meningkatkan kualitas rumusan hasil (Tujuan/ Sasaran)

agar jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai, memperbaiki target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja sehingga dapat dicapai, menantang, realistis serta agar setiap dokumen perencanaan kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan.

Gambaran capaian indikator kinerja utama Dinas Perdagangan perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 tertera pada grafik berikut.



Gambar 3.1 Realisasi Kinerja Utama Tahun 2024

3.1.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 - 2024

Target kinerja utama pada perangkat daerah direncanakan selalu naik, dengan tolok ukur adanya peningkatan kualitas hasil kinerja. Pemantauan perkembangan capaian target dalam tiga tahun terakhir didasarkan dengan ditetapkannya RPJMD Perubahan Kabupaten Karanganyar tahun 2018 – 2023.

Hasil realisasi indikator kinerja utama Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten karanganyar 2022 – 2024 tercantum pada tabel berikut.

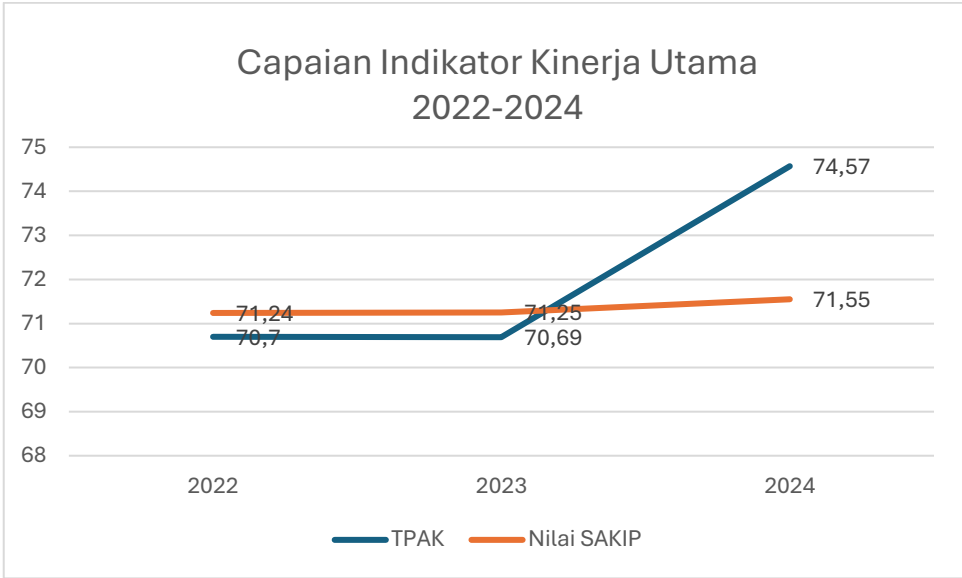
Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Utama Tahun 2022-2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	74.51	70.7	94.88	74.51	70.69	94.87	71.10	74.57	104.88
2	Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah	Nilai SAKIP	70.5	71.24	101.05	71.26	71.25	99.9	71.55	71.55	100

Realisasi indikator kinerja Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar pada tahun 2022 hingga tahun 2024 mengalami dinamika

perubahan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2022 hingga tahun 2024 cenderung mengalami peningkatan. Demikian juga pada indikator nilai Sakip, mengalami peningkatan dari tahun 2021-2024.

Perkembangan realisasi indikator kinerja utama tahun 2022-2024 dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 3.2 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2022-2024

3.1.3 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Akhir RPJMD

Tahun 2024 merupakan tahun awal dari Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026. Pada tahun 2024 diperhitungkan indikator kinerja dapat mencapai target yang direncanakan. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2024 terhadap akhir tahun Rencana Pembangunan Daerah tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.4
Kemajuan Realisasi Sasaran Strategis

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	74.57	71.6	104.41
2	Meningkatkan produktivitas perdagangan yang berdaya saing	Jumlah produk lokal yang berpotensi unggulan	5 unit	7 unit	71.42
3	Meningkatkan kuantitas sentra industri kecil dalam pengembangan produk IKM	Jumlah sentra industri kecil yang dibentuk	3 sentra	10 sentra	30
4	Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah	Nilai SAKIP	71.55	71.40	100.21

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada tahun 2024 sebesar 74.57 melebihi dari target 2026 sebesar 71.6. Sehingga pencapaian sebesar 104.41%. Jumlah produk lokal yang berpotensi unggulan pada tahun 2024 lebih rendah, yaitu 5 unit. Sedangkan target

pada tahun 2026 adalah 7 unit, sehingga capaian baru 71.42%. Diharapkan pada tahun 2026, target tersebut bisa tercapai. Jumlah sentra industri kecil pada tahun 2024 mencapai 3 sentra, hal ini masih lebih sedikit dibanding target tahun 2026 yaitu 10 sentra, sehingga capaian sebesar 30%. Untuk mencapai 10 sentra pada tahun 2026 bukan lah hal yang mudah, karena memerlukan banyak Upaya dari pemerintah selaku penampung.

3.1.4 Perbandingan Capaian Kinerja Utama Kabupaten dengan Provinsi dan Nasional

Realisasi kinerja utama kabupaten perlu dibandingkan dengan capaian provinsi, untuk mengetahui sejauh mana kontribusi kinerja kabupaten dengan provinsi. Perbandingan realisasi kinerja kabupaten dibandingkan dengan provinsi Jawa Tengah tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian dengan Standar Provinsi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Kabupaten	Jawa Tengah	% Capaian
1	Meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	74.57	73.74	101.12

Realisasi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Karanganyar tahun 2024 lebih tinggi dari realisasi di Jawa Tengah, dengan capaian 101.12%.

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Kabupaten	Nasional	% Capaian
1	Meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	74.57	70.63	105.57

Realisasi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Karanganyar tahun 2024 lebih tinggi dari realisasi Nasional, dengan capaian 105.57%.

3.1.5 Analisis Keberhasilan Kegagalan dan Solusi 2024

Dalam pelaksanaan kegiatan selama tahun 2024, dapat terjadi permasalahan atau kendala yang dapat mengakibatkan terhambatnya kegiatan sehingga memungkinkan

tidak tercapainya target sesuai yang ditetapkan. Identifikasi keberhasilan maupun kegagalan tertera pada tabel berikut.

Tabel 3.7

Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan /kegagalan	Solusi
1	Meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	71.10	74.57	104.88	Kateori capaian Melebihi target Penyebab : Perangkat daerah aktif memberikan informasi lowongan kerja, memfasilitasi pemenuhan kebutuhan tenaga kerja dariduniusaha dunia industri, meningkatkan kualitas kurikulum Lembaga pelatihan, meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan berbasis kompetensi, melaksanakan pendampingan untuk menumbuhkan minat kerja di usia muda. Perangkat daerah aktif memberikan informasi lowongan kerja, memfasilitasi pemenuhan kebutuhan tenaga kerja dari dunia usaha dunia industri, meningkatkan kualitas kurikulum Lembaga pelatihan, meningkatkan	Meningkatkan kualitas pelatihan berbasis kompetensi, meningkatkan fasilitasi untuk penempatan tenaga kerja Meningkatkan kualitas pelatihan berbasis kompetensi, meningkatkan fasilitasi untuk penempatan tenaga kerja
2	Meningkatkan produktivitas perdagangan yang yang berdaya saing	Jumlah produk lokal yang berpotensi unggulan	5 unit	5 unit	100 %	Kategori capaian sesuai target. Penyebab: Situasi ekonomi pasca covid telah membaik,	Meningkatkan kualitas produk unggulan daerah Meningkatkan kualitas barang dan peluang ekspor

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan /kegagalan	Solusi
						Perangkat daerah memfasilitasi kegiatan untuk meningkatkan daya beli dengan mempromosikan produk unggulan, pendampingan pelaku ekspor untuk meningkatkan kualitas produk. Perangkat daerah aktif memfasilitasi munculnya produk unggulan.	Meningkatkan fasilitasi promosi produk unggulan
3	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sentra industri kecil dalam pengembangan produk IKM	Jumlah sentra industri kecil yang dibentuk	3 sentra	3 sentra	100 %	Kategori capaian sesuai target Penyebab Meningkatnya aktivitas ekonomi sektor industri pengolahan. Penyebab: Perangkat daerah aktif melaksanakan fasilitasi pendampingan pemberdayaan industri dan pemberdayaan masyarakat. Melaksanakan pelaporan informasi industri dengan bak	Meningkatkan kualitas produk industri kecil Meningkatkan fasilitasi pembentukan industri kecil
7	Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah	Nilai SAKIP	71.55	71.55	100	Kategori capaian sesuai target. Penyebab : Perangkat daerah berupaya meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, melakukan pemantauan pengukuran kinerja, melaksanakan pelaporan kinerja, melakukan	Meningkatkan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan Meningkatkan mitigasi risiko dan dampak pada kegiatan

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan /kegagalan	Solusi
						evaluasi internal atas pencapaian kinerja.	

Apabila dalam pelaksanaan kegiatan ditemukan suatu masalah, harus dicari penyebab permasalahan tersebut kemudian ditetapkan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Namun jika tidak ditemui kendala, tetap diperlukan solusi untuk lebih meningkatkan realisasi capaian.

Pada tahun 2024 tidak ditemui kendala yang berarti, sehingga realisasi kegiatan dapat berjalan lancar dan realisasi dapat memenuhi sesuai target.

3.1.6 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran Tahun 2024

Pelaksanaan kegiatan pada perangkat daerah memerlukan besaran anggaran agar dapat berjalan dengan baik. Kinerja anggaran merupakan capaian kinerja atas segala yang berkaitan dengan kegiatan keuangan pada suatu institusi pada periode tertentu. Tingkat efisiensi anggaran merupakan ukuran suatu keberhasilan dari suatu kegiatan ayng dinilai berdasarkan bisarnya biaya atau sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Besaran anggaran pada tiap indikator kinerja utama (tujuan dan sasaran strategis) Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja tahun 2024 serta tingkat efisiensi tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.8
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	Indikator Kinerja				Anggaran (Rp)			Tingkat Efisiensi
	Tujuan / Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	Meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	74.57	104.88	2.203.747.000	2.157.373.805	97.8	2.12
2	Meningkatkan produktivitas perdagangan yang yang berdaya saing	Jumlah Produk lokal yang berpotensi unggulan	5	100	1.399.510.000	1.389.045.740	99.2	0.74
3	Meningkatkan kuantitas sentra industri kecil dalam pengembangan produk IKM	Jumlah sentra industry kecil yang terbentuk	3	100	1.618.165.000	1.597.280.435	98.70	1.2
4	Meningkatkan akuntabilitas	Nilai Sakip	71.55	100	18.111.394.768	16.779.722.405	92.64	7.35

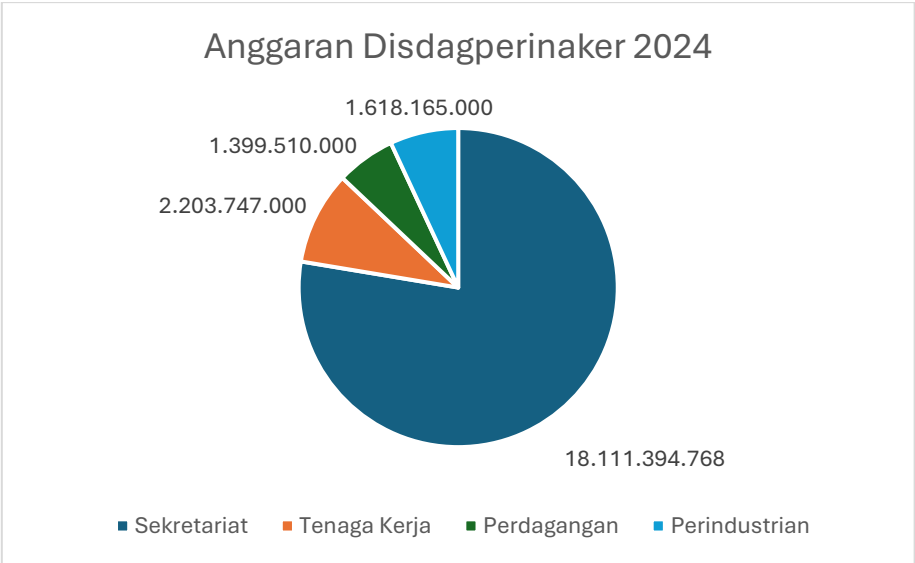
No	Indikator Kinerja				Anggaran (Rp)			Tingkat Efisiensi
	Tujuan / Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
	perangkat daerah							

Tingkat efisiensi anggaran belanja merupakan ukuran sebuah keberhasilan dari suatu kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya atau sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Efisiensi penggunaan anggaran Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab Karanganyar dilakukan dengan mengurangi pemborosan dan penyalahgunaan anggaran, memperbaiki proses pengadaan barang dan jasa, serta meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap penggunaan anggaran oleh pemerintah.

Mengurangi pemborosan atrinya pada saat penyusunan anggaran, penetapan kebutuhan barang dan jasa hanya untuk barang dan jasa yang benar-benar diperlukan dan sesuai untuk pelaksanaan kegiatan. Perangkat daerah melakukan pengawasan intern dan pemantauan agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran.

Proses pengadaan barang jasa merupakan hal penting. Hal ini diawali dari penyusunan SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan). Pada saat ini ditentukan metode pengadaan sehingga diharapkan pelaksanaan berjalan efisien. Yang terpenting adalah proses monitoring dan pengawasan atas penggunaan anggaran.

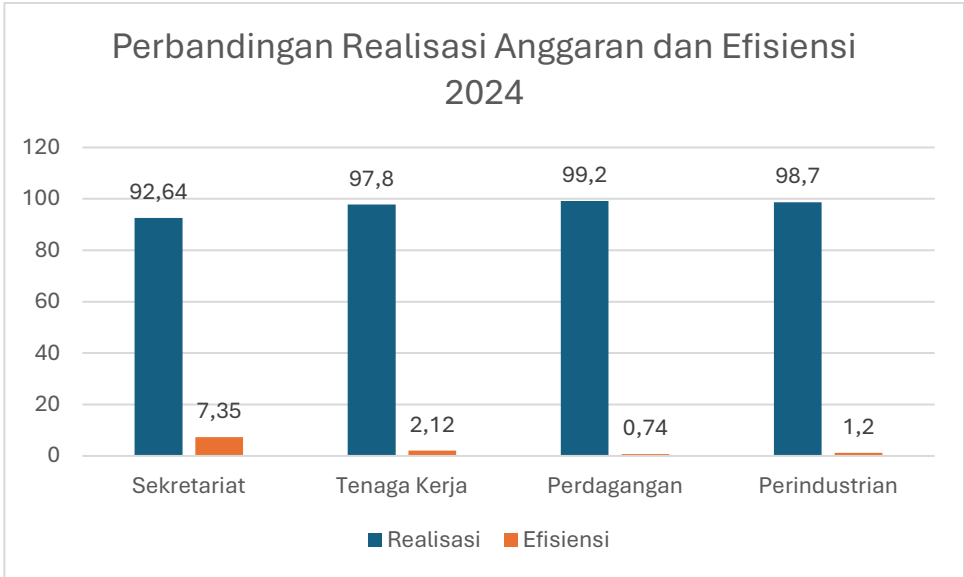
Proporsi alokasi anggaran pada setiap urusan yang menunjang pencapaian indikator kinerja utama sesuai pada grafik berikut.



Gambar 3.3 Grafik Alokasi Anggaran Disdagperinaker 2024

Anggaran untuk urusan penunjang urusan pemerintahan mendapat jumlah yang lebih besar dibanding urusan perdagangan, perindustrian dan tenaga kerja. Urusan perdagangan mendapat alokasi anggaran yang paling sedikit. Urusan penunjang urusan pemerintahan termasuk didalamnya untuk gaji dan tunjangan ASN.

Realisasi anggaran dan efisiensi serapan anggaran tergambar pada grafik berikut.



Gambar 3.4 Grafik Realisasi dan Efisiensi Anggaran 2024

Sesuai grafik di atas diketahui bahwa serapan anggaran di semua urusan yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama, terserap lebih dari 90% anggaran. Efisiensi tercatat kurang dari 10%. Anggaran tersebut dipergunakan untuk mendukung keberhasilan pencapaian target indikator kinerja utama Disdagperinaker 2024.

3.1.7 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan 2024

Upaya pelaksanaan indikator tujuan dan sasaran Disdagperinaker 2024, didukung dengan program dan target capaian yang telah ditetapkan. Analisis keberhasilan program dan kegiatan tertera pada tabel berikut.

Tabel 3.9
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	Meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	104.88				
				Program Perencanaan Tenaga Kerja	Jumlah dokumen Rencana Tenaga kerja Makro	25%	Menunjang
				Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase ketersediaan tenaga kerja yang terampil dan terlatih	25%	Menunjang
				Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	55%	Menunjang
				Program Hubungan Industrial	Persentase perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan	100%	Menunjang
2	Meningkatkan produktivitas perdagangan yang berdaya saing	Jumlah Produk lokal yang berpotensi unggulan	100	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	100%	Menunjang
				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar dalam kondisi baik	50%	Menunjang
				Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase sarana perdagangan yang memiliki informasi harga	16%	Menunjang
				Program Pengembangan Ekspor	Jumlah pelaku ekspor	50	Menunjang
				Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat timbang yang ditera ulang	87 %	Menunjang
				Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah produk lokal yang telah difasilitasi dalam kemitraan pameran	100 produk	Menunjang
3	Meningkatkan kuantitas sentra industri kecil dalam pengembangan produk IKM	Jumlah sentra industry kecil yang terbentuk	100	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Prosentase peningkatan jumlah industri kecil dan menengah baru	34%	Menunjang

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Program Pengendalian ijin usaha industri	Jumlah perijinan Perusahaan yang dipantau	100%	Menunjang
				Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah industri yang melaporkan pada aplikasi SIINas		Menunjang
4	Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah	Nilai Sakip	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	71,55	Menunjang

Capaian indikator sasaran Disdagperinaker 2024 didukung oleh berjalannya program kegiatan secara efektif. Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Rasio Angkatan Kerja yang Bekerja didukung oleh berjalannya Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja dan Program Hubungan Industrial. Aktivitas yang dilakukan selalu dipantau dan dimonitoring agar mencapai output yang direncanakan. Aktivitas yang dilaksanakan adalah Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi, Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, Pelayanan antar Kerja. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja, Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online, Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator Jumlah produk lokal yang berpotensi unggulan didukung oleh Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan, Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Program Pengembangan Ekspor Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri. Program tersebut didukung aktivitas Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Gudang, Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan, Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota.

Indikator jumlah sentra industri cokecil yang dibentuk didukung oleh Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional dan program Pengendalian Ijin Usaha Industri. Aktivitas yang mendukung tercapainya indikator tersebut adalah Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat, dan Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

Indikator Nilai SAKIP dan Indeks Kepuasan Masyarakat didukung Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Aktivitas yang dilakukan untuk pencapaian indikator adalah administrasi keuangan, kepegawaian dan perencanaan.

Beberapa dokumentasi kegiatan yang mendukung program di Disdagperinaker tahun 2024 tercantum pada gambar di berikut.



Gambar 3.5 Pelatihan Berbasis Kompetensi Pembuatan Roti dan Kue



Gambar 3.6 Pelatihan Berbasis Kompetensi Tata Kecantikan Rambut



Gambar 3.7 Tera/Tera ulang UTTP Ukur Takar Timbang dan Peralatannya di SPBU



Gambar 3.8 Pelatihan Peningkatan Produktivitas Pelinting dan Blending Sigaret Kretek Tangan



Gambar 3.9 Kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi penggunaan anggaran pada tahun 2024 tercantum pada tabel berikut

Tabel 3.10

Capaian Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			
	<i>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</i>			
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro.	8.927.250	7.678.200	86,01
2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
	<i>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</i>			
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1.725.523.000	1.688.630.055	97,86
	<i>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</i>			
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.	30.000.000	29.107.200	97,02
	<i>Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja</i>			
	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi.	3.000.000	2.796.500	93,22
	<i>Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil</i>			
	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil.	2.000.000	1.988.000	99,40
	<i>Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>			
	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja.	2.000.000	1.997.800	99,89
3	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			
	<i>Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota</i>			
	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja.	25.000.000	24.469.000	97,88
	Pelayanan antar Kerja.	6.000.000	5.960.500	99,34
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja.	15.000.000	14.781.500	98,54
	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan.	15.000.000	14.714.200	98,09
	Perluasan Kesempatan Kerja	20.000.000	19.632.400	98,16

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online.	27.200.000	26.331.200	96,81
	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota			
	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI).	8.000.000	7.993.750	99,92
	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	2.000.000	1.386.400	69,32
4	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	15.000.000	14.777.000	98,51
	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	15.000.000	14.751.800	98,35
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	10.000.000	9.509.750	95,10
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	10.000.000	9.808.000	98,08
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.	10.000.000	9.786.250	97,86
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja /Serikat Buruh serta Non Afiliasi	5.000.000	4.912.50	98,25
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota.	175.000.000	172.938.100	98,82
	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja.	5.000.000	4.622.500	92,45
5	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan			
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	6.249.500	6.207.300	99,32
	Penerbitan Tanda Daftar Gudang			
	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	4.510.000	4.417.400	97,95
6	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	477.900.000	471.640.200	98,69
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	573.500.000	572.967.550	99,91
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya			
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	20.000.000	19.995.600	99,98
7	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	20.000.000	19.995.600	99,98
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	15.000.000	14.940.450	99,60
8	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			
	<i>Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>			
	Pameran Dagang Lokal	38.502.000	38.276.600	99,41
	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	6.615.900	6.613.800	99,97
9	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			
	<i>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</i>			
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	45.000.000	44.209.940	98,24
10	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			
	<i>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</i>			
	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	200.000.000	197.547.200	98,77
11	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			
	<i>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</i>			
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.	5.000.000	4.744.700	94,89
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran, dan Perwilayahan Industri	47.900.000	46.581.710	97,25
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	15.000.000	14.947.850	99,65
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	20.000.000	19.887.000	99,44
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat.	1.465.965.000	1.447.314.725	98,73
12	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI			
	<i>Penerbitan Izin Usaha (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota</i>			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor Perindustrian yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	6.800.000	6.785.600	99,79
	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission	8.200.000	8.084.600	98,59
13	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			
	<i>Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</i>			
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).	45.000.000	44.701.500	99,34
	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/kota melalui SIINas	2.200.000	2.164.200	98,37
	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	2.100.000	2.068.550	98,50
14	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	21.420.000	21.335.873	99,61
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.	3.000.000	2.922.100	97,40

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.	3.000.000	2.920.600	97,35
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.000.000	4.848.600	96,97
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.000.000	2.998.300	99,94
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	43.000.000	42.704.200	99,31
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.679.907.768	9.437.463.504	88,37
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	16.000.000	15.490.000	96,81
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10.000.000	9.783.600	97,84
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.000.000	14.530.850	96,87
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	16.700.000	15.780.200	94,49
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	8.049.700	7.775.600	96,59
	Pengolahan Data Retribusi Daerah	11.950.000	11.871.200	99,34
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	615.000.000	611.735.000	99,47
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	409.420.000	391.546.450	95,63
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.288.000	14.288.00	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.400.000	23.384.000	85,3
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	351.800.000	347.206.400	98,69
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	174.000.000	173.586.000	99,76
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	231.675.900	231.293.151	99,83
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.665.000	4.665.000	100
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5.000.000	4.093.000	81,86
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	Pengadaan Mebel	103.300.000	93.500.000	90,51
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	151.500.000	145.600.000	96,11
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	537.257.400	536.481.700	99,86
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	76.500.000	75.586.200	98,81
	Total	23.332.816.768	21.923.422.385	93,96

Total anggaran Disdagperinaker Tahun 2024 untuk semua program yang mendukung tujuan dan sasaran strategis adalah Rp 23.332.816.768, - (Dua puluh tiga milyar tiga ratus tiga puluh dua juta delapan ratus enam belas ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah). Serapan anggaran sebesar Rp. 21.923.422.385,- (Dua puluh satu milyar Sembilan ratus dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) atau sebesar 93.96%. Efisiensi anggaran sebesar Rp. 1.409.394.383,- (Satu milyar empat ratus Sembilan juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah), atau sebesar 6.04 %.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Hasil pengukuran kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja terdiri atas 4 (empat) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator sebagai berikut.

1. Capaian kinerja lebih dari 100% atau kategori melebihi target terdapat satu indikator sasaran, yaitu Partisipasi Angkatan Kerja.
2. Capaian kinerja tepat 100% atau sesuai target sejumlah 3 (tiga) indikator sasaran, yaitu Jumlah produk lokal yang berpotensi unggulan, Jumlah sentra industri kecil yang dibentuk, Nilai SAKIP OPD.

4.2 Saran

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar selalu direview oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Berdasarkan hasil review, maka saran yang diberikan adalah sebagai berikut

1. Menyusun pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.
2. Menyusun pedoman pemantauan mengenai perkembangan atau kemajuan pencapaian kinerja OPD.
3. Memberikan edukasi kepada setiap pegawai untuk merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja yang ditetapkan dan tindak lanjut yang dilakukan.